

UNVEILING THE PATH TO PROSPERITY IN PAPUA : AN ANALYSIS OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT TRENDS IN EDUCATION (2018-2023)

Author 1, Ainur Oktania, Universitas Negeri Medan

Author 2, Putri Kemala Dewi Lubis, Universitas Negeri Medan

Author 3, Eza Syahbana, Universitas Negeri Medan

Author 3, Muhammad Aldi Akbar, Universitas Negeri Medan

Abstract

Keywords:

Pendidikan, Human This study aims to analyze the impact of human capital investment through education on human development in Papua Province, in line with the promise of special autonomy that mandates the allocation of funds for education. The research methodology uses panel data regression with the EViews application, with 29 districts/cities in Papua Province as the research object. The results of the analysis show that partially, the average length of school (RLS), the length of school life expectancy (HLS), and the life expectancy rate (AHH) have a positive and significant influence on the Human Development Index (HDI). Simultaneously, the three independent variables contributed 99.85% to HDI. The conclusion of this study is that investment in education has an important role in improving human development in Papua Province, as well as reflecting the efforts to implement the promise of special autonomy in improving the quality of life of the local population., Ekonomi .

*** Corresponding Author:**

Ainur Oktania,

Universitas Negeri Medan

Jl. W. Iskandar Psr V Medan Esatake Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, Indonesia.

Email: ainuroktania0@gmail.com

Citation: Oktania, A., Lubis, PKD., Syahbana, E.. & Akbar, MA., (2023). Unveiling The Path To Prosperity In Papua : An Analysis Of Human Capital Investment Trends In Education (2018-2023). *DIDAKTIKA: Jurnal Kependidikan*, 18(1), 1 - 11. Doi.org/10.25273/pe.v10i1.xxxx

The article is published with Open Access at: <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/PE>



Published by Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

INTRODUCTION

Ekonomi pendidikan merupakan aspek yang sangat vital dalam domain ekonomi, dan tidak dapat dipisahkan dari ilmu ekonomi sumber daya manusia yang bertujuan untuk memajukan masyarakat melalui pembangunan (Yahya 2009). Dalam hal pendidikan terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian di Provinsi Papua, yaitu kuantitas dan kualitas. Dari aspek kuantitas untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, masih mengalami keterbatasan terutama di beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, dan Dogiyai. Sementara dari segi kualitas, banyak sekolah di Provinsi Papua yang belum memiliki akreditasi dan belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Kekurangan jumlah guru, terutama untuk mengajar di tingkat SD, juga dirasakan di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Tanah Papua. Kondisi ini secara luas diperkirakan berdampak pada kinerja pendidikan di wilayah tersebut.

Keterbatasan aksesibilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, dan kekurangan jumlah guru dapat menjadi faktor kunci yang mempengaruhi IPM di wilayah ini. Keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti, seperti angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan IPM, sangatlah erat. Angka harapan hidup yang tinggi dan harapan lama sekolah yang panjang cenderung berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM. Begitu juga, rata-rata lama sekolah yang memadai secara langsung memengaruhi kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

Dalam kerangka teori human capital, investasi dalam pendidikan dipandang sebagai modal utama yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, adanya gap data terkait investasi pendidikan modal manusia, terutama di Provinsi Papua, menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Teori human capital memberikan dasar bagi pemahaman tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan manusia. Melalui identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM, serta kaitannya dengan investasi pendidikan modal manusia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah pendidikan di Provinsi Papua. Dengan analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan potensi solusi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan, akhirnya, IPM di wilayah tersebut. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antar variabel serta menyajikan temuan yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia di Provinsi Papua.

Teori Modal Manusia (Human Capital) dan Investasi Pendidikan

Teori Modal Manusia (Human Capital) adalah konsep ekonomi yang menggambarkan manusia sebagai suatu bentuk modal atau aset yang dapat diperdagangkan. Konsep ini menganggap bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan individu akan meningkatkan produktivitas mereka di pasar tenaga kerja, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Keyakinan dalam teori human capital ini, berkembang luas dalam kehidupan sosial diseluruh dunia, sehingga sebagaimana

diungkapkan sejak lama oleh (Strober 1990), "jika anda ingin memperoleh pekerjaan yang baik, dapatkan pendidikan yang baik pula".

Pendekatan teori modal manusia menyoroti pentingnya investasi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan, karena hal ini dianggap sebagai faktor penting dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian dalam perspektif teori human capital, tingginya pendidikan akan memberikan dampak terhadap kemudahan memperoleh pekerjaan, tingginya produktivitas dan pendapatan baik dilihat dari sisi individual, organisasional dan juga negara (Hidayati et al. 2022). Investasi pendidikan mencakup pengeluaran untuk pendidikan formal dan informal, seperti biaya sekolah, buku-buku, biaya kuliah, dan program pelatihan. Investasi pendidikan dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kualifikasi, pengetahuan, dan keterampilan individu, sehingga meningkatkan potensi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah metrik gabungan yang digunakan untuk menilai kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara atau wilayah. Diciptakan oleh PBB pada tahun 1990, IPM menggabungkan beberapa aspek penting dari kesejahteraan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi manusia daripada hanya mengandalkan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB). IPM biasanya dihitung dengan menggunakan sejumlah indikator kunci, seperti harapan hidup saat lahir untuk dimensi kesehatan, tingkat melek huruf dan partisipasi sekolah untuk dimensi pendidikan, serta pendapatan per kapita untuk dimensi taraf hidup. Dengan mengintegrasikan berbagai dimensi ini dalam satu indeks, IPM memberikan informasi yang lebih holistik tentang kesejahteraan manusia dan kemajuan suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Ini memungkinkan pembandingan antar negara dan penilaian terhadap efektivitas kebijakan pembangunan dalam mengurangi ketimpangan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan mencapai kemajuan secara inklusif.

Tidak hanya sebagai alat pengukuran, IPM juga berfungsi sebagai pendorong tindakan dan kebijakan yang lebih efisien dalam pembangunan manusia. Pembangunan merupakan upaya atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik (Arif et al. 2023). Dengan menyediakan pemahaman yang mendalam tentang dimensi-dimensi utama kesejahteraan manusia, IPM membantu pemerintah dan lembaga internasional dalam merumuskan prioritas kebijakan, mengalokasikan sumber daya dengan tepat, dan mengevaluasi dampak dari program-program pembangunan. Selain itu, IPM juga memungkinkan kelompok masyarakat sipil, LSM, dan advokat untuk memonitor kemajuan pembangunan dan melakukan advokasi untuk perubahan yang diperlukan guna meningkatkan kondisi hidup masyarakat. Oleh karena itu, IPM bukan hanya sekadar alat pengukuran statistik, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia di seluruh dunia.

Kondisi Pendidikan di Provinsi Papua

Kondisi pendidikan di Provinsi Papua terus menjadi tantangan yang memengaruhi indeks pembangunan manusianya. Meskipun telah ada upaya-upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kualitas pendidikan, yang tercermin dalam kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat melek huruf dan kemampuan akademik di antara penduduk Papua. Selain itu, kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas masih menjadi kendala, terutama di daerah terpencil dan terisolasi di Papua. Faktor geografis dan infrastruktur yang kurang memadai membuat beberapa daerah sulit dijangkau oleh layanan pendidikan yang memadai.

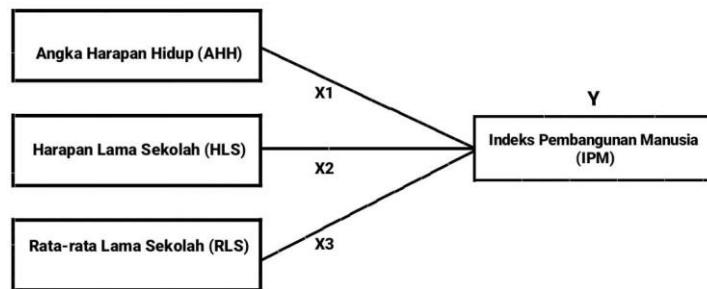
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 mengamanatkan bahwa setiap institusi pendidikan harus menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang mencakup aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor kunci yang dapat memengaruhi mutu pendidikan. Adanya lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran akan memastikan peserta didik dapat belajar dengan optimal dan mencapai hasil pembelajaran yang maksimal (B. Papua 2022).

Pada tahun 2021, hanya 61,90 persen dari penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah, sementara sebagian besar sisanya, yakni 38,10 persen, telah keluar dari sekolah atau bahkan belum pernah mengenyam pendidikan formal. Tingkat partisipasi pendidikan juga menunjukkan tren penurunan yang signifikan seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Angka Partisipasi Murni (APM) menurun dari 80,38 persen di tingkat SD/MI/sederajat menjadi hanya 44,41 persen di tingkat SMA/SMK/MA/sederajat. Demikian pula, Angka Partisipasi Kasar (APK) mengalami penurunan dari 93,07 persen di tingkat SD/MI/sederajat menjadi 75,05 persen di tingkat SMA/SMK/MA/sederajat. Pola penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan yang cukup besar dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi di Provinsi Papua. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan peningkatan akses serta kualitas pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan guna meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di wilayah tersebut (B. Papua 2023).

METHODS

Objek penelitian meliputi 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, yang dipilih sebagai unit analisis yang representatif. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua serta sumber data resmi pemerintah dan buku-buku relevan. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif dan terperinci untuk memastikan keakuratan dan representativitas informasi. Analisis data menggunakan metode regresi data panel dengan aplikasi EViews. Langkah-langkah analisis meliputi uji pemilihan model terbaik menggunakan uji Chow untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya, uji Hausman digunakan untuk memilih antara Random Effect Model (REM) dan FEM. Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa model terbaik adalah FEM.

Setelah pemilihan model, dilakukan pemeriksaan asumsi klasik, seperti uji heteroskedastisitas dan multikolinearitas, untuk memvalidasi hasil analisis. Rumus persamaan analisis regresi panel least squares dan variabel yang diteliti meliputi :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

$$\text{LogIPM} = \beta_0 + \beta_1 \text{AHH} + \beta_2 \text{HLS} + \beta_3 \text{RLS} + eit \dots \dots (1)$$

LogIPM = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

AHH = Angka Harapan Hidup (AHH)

HLS = Harapan Lama Sekolah (HLS)

RLS = Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

eit = Standar Eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi/Indikator (1)	Satuan (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	67,59	67,72	67,98	68,17
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,08	11,11	11,14	11,15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,69	6,76	7,02	7,15
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riiil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	6.954	6.955	7.146	7.562
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
		61,22	61,40	62,16	63,01

Gambar 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020-2023

Sumber : Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 2023

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam semua dimensi yang membentuk IPM, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM pada tahun 2023 juga menunjukkan percepatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan peningkatan yang

konsisten terutama pada dimensi standar hidup layak. Dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat, harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2023 meningkat menjadi 68,17 tahun, naik sebesar 0,19 tahun dari tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan yang positif dalam kualitas hidup. Sementara itu, dalam dimensi pengetahuan, terlihat peningkatan pada harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. HLS meningkat sebesar 0,01 tahun menjadi 11,15 tahun, sedangkan RLS meningkat sebesar 0,13 tahun menjadi 7,15 tahun pada tahun 2023.

Analisis juga mencatat peningkatan signifikan dalam dimensi standar hidup layak, yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun, yang meningkat sebesar 416 ribu rupiah atau sebesar 5,82 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data-data ini berasal dari hasil survei Long Form SP2020 untuk umur harapan hidup, dan survei Susenas Maret untuk HLS, RLS, serta pengeluaran riil per kapita per tahun. Perkembangan ini menandakan kemajuan yang berarti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di wilayah tersebut.

Tabel 1. Pemilihan Model Terbaik

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Chow	Prob. > 0,05	CEM
	Prob. < 0,05	FEM
Uji Hausman	Prob. > 0,05	REM
	Prob. < 0,05	FEM

Untuk menetapkan model regresi yang optimal di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), dilakukan rangkaian pengujian statistik. Tahap awal melibatkan uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM, serta uji Hausman untuk membandingkan FEM dan REM. Subsequently, a Lagrange Multiplier test was conducted to compare CEM and REM. Berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman, model terbaik dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, di mana dalam situasi ini Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model paling optimal. Oleh karena itu, uji Lagrange Multiplier tidak diperlukan dalam konteks ini.

Setelah pemilihan model terbaik, dilakukan uji asumsi klasik untuk memverifikasi kesesuaian data dengan model yang dipilih. Karena jumlah data yang dianalisis melebihi 100, hanya dua uji yang dilakukan, yakni uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dengan demikian, langkah ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis regresi telah memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

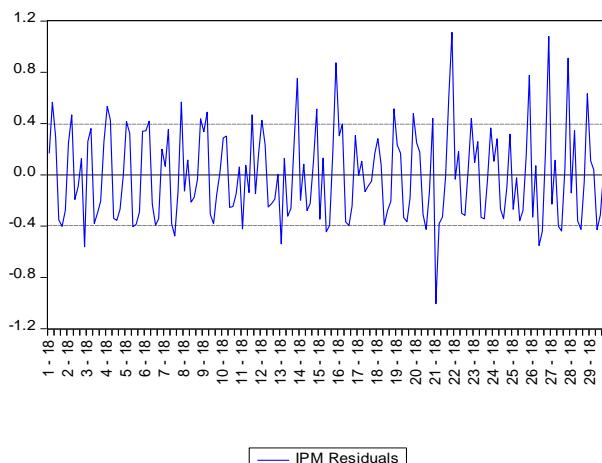
Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variabel	AHH	HLS	RLS
AHH	1.000000	0.428265	0.507373
HLS	0.428265	1.000000	0.851852
RLS	0.507373	0.851852	1.000000

Berdasarkan hasil dari uji koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar $0.428265 < 0.90$ dan X3 sebesar 0.507373, dan X2 dan X3 sebesar $0.851852 < 0.90$. Maka dapat disimpulkan bahwa lolos uji multikolinearitas.

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil dari uji yang dilakukan, didapat hasil grafik tidak melewati atau kurang dari 500 maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Makna Persamaan Regresi

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	t-tabel	t-Statistic	Prob.	Adjust R-squared	F-statistic
C	22.01910	1.97385216 9	7.186802	0.0000		
AHH	0.141319	1.97385216 9	2.609916	0.0100	0.998519	3764.817
HLS	1.152145	1.97385216 9	6.924926	0.0000		
RLS	2.250898	1.97385216 9	10.65729	0.0000		

$$\text{IPM} = 22.0190997433 + 0.141319364751 * \text{AHH} + 1.15214518386 * \text{HLS} + 2.25089819686 * \text{RLS} + [\text{CX}=\text{F}] \dots \dots (2)$$

Keterangan :

1. Konstanta sebesar 22.0190997433. Artinya jika Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah nol, maka akan meningkatkan IPM di Provinsi Papua sebesar 22.0190997433 dengan asumsi hal-hal lain tetap (ceteris paribus).
2. Koefisien regresi Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 0.141319364751. Artinya jika Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat sebesar satu satuan, maka akan menaikkan IPM di Provinsi Papua sebesar 0.141319364751.
3. Koefisien regresi Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 1.15214518386. Artinya jika Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan IPM di Provinsi Papua sebesar 1.15214518386.
4. Koefisien regresi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 2.25089819686. Artinya jika Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan IPM di Provinsi Papua sebesar 2.25089819686.

Hasil Uji-t (Parsial)

Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) Terhadap IPM Di Papua

Nilai t hitung sebesar 2.609916 > t tabel 1.973852169 dan prob. 0.0000 (lebih kecil dari 0,05), maka H_0 ditolak artinya H_a diterima (Variabel X secara individu berpengaruh terhadap variabel Y). Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan Angka Harapan Hidup (AHH) Terhadap IPM Di Provinsi Papua.

Pengaruh Harapan Lama Sekolah (HLS) Terhadap IPM Di Papua

Nilai t hitung sebesar $6.924926 > t$ tabel 1973852169 dan prob. 0.0000 (lebih besar dari $0,05$) maka H_0 ditolak artinya H_a diterima (Variabel X secara individu berpengaruh terhadap variabel Y). Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap IPM Di Papua.

Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Terhadap PDRB Di Papua

Nilai t hitung sebesar $10.65729 > t$ tabel 1973852169 dan prob. 0.0000 (lebih besar dari $0,05$) maka H_0 ditolak artinya H_a diterima (Variabel X secara individu berpengaruh terhadap variabel Y). Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap IPM Di Papua.

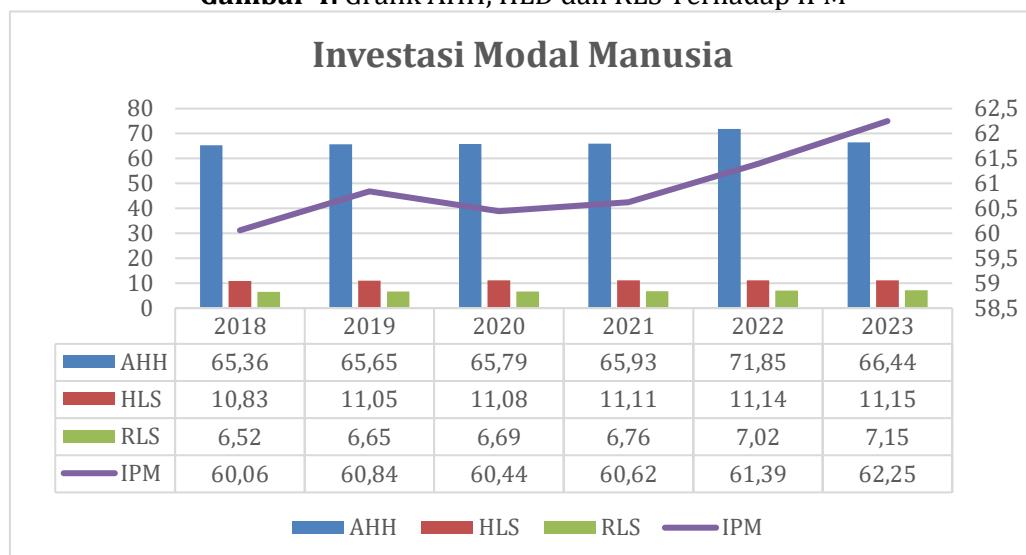
Hasil Uji F (Simultan)

Nilai F hitung $3764.817 > F$ table 2.657761987 dan nilai prob. 0.000000 (lebih kecil dari $0,05$) maka H_0 ditolak artinya H_a diterima (Variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y). Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), terhadap IPM di Provinsi Papua.

Hasil R Square = $0.998519 \times 100 = 99.85\%$

Nilai R squared sebesar 0.998519 . Artinya variabel Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), terhadap IPM di Provinsi Papua sebesar 99.85% , sedangkan sisanya 0.15% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 4. Grafik AHH, HLD dan RLS Terhadap IPM



Pembangunan manusia adalah ide dasar dalam memposisikan manusia sebagai aset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi yang menekankan pada gagasan kemampuan manusia sebagai sentral Pembangunan (Manurung and Hutabarat 2021). Dari data yang disajikan, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam investasi modal manusia bidang pendidikan di Provinsi Papua dalam periode 2018-2023. Tren ini tercermin dalam peningkatan angka IPM dari 60,06 pada tahun 2018 menjadi 62,25 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya investasi dalam pendidikan, yang tercermin dalam indikator angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), dan rata-rata lama sekolah (RLS), memberikan dampak yang positif terhadap kualitas hidup dan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Angka harapan hidup meningkat secara bertahap dari 65,36 pada tahun 2018 menjadi 66,44 pada tahun 2023, sementara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun.

Peningkatan investasi modal manusia bidang pendidikan ini dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap tantangan dan kebutuhan akan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua. Dengan adanya peningkatan angka IPM dan indikator pendidikan, seperti AHH, HLS, dan RLS, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan stakeholder terkait telah melakukan upaya yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Meskipun masih terdapat fluktuasi dalam beberapa tahun tertentu, tren keseluruhan menunjukkan arah yang positif dalam upaya meningkatkan modal manusia melalui pendidikan di Provinsi Papua.

Janji di Masa Otonomi Khusus

Pembangunan merupakan upaya atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik (Madris 2021). Janji pendidikan di masa otonomi khusus Provinsi Papua merupakan komitmen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di wilayah tersebut. Meskipun pemerintah daerah Provinsi Papua memiliki wewenang luas dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan pendidikan, penekanan pada pendidikan dasar yang bermutu tetap menjadi prioritas, sesuai dengan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang tersebut (Afriansyah 2022). Pasal ini menetapkan alokasi minimal 30% dari dana perimbangan untuk mendukung pendidikan di Papua.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus, dibentuklah Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang bertugas mengoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan di wilayah Papua. Namun, meskipun telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan di Papua, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut antara lain meliputi masalah aksesibilitas dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan terisolasi. Persepsi masyarakat terhadap otonomi khusus Papua menunjukkan bahwa pendidikan di provinsi ini masih di bawah standar nasional. Selain itu, pengelolaan anggaran pendidikan juga menjadi perhatian, dengan ditemukannya bahwa beban pendidikan di provinsi tersebut masih belum mencapai target yang diinginkan.

Pada sisi lain, Undang-Undang Otsus No. 21 Tahun 2001 memberikan arahan yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan di Provinsi Papua. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut mencakup penghormatan terhadap hak-hak dasar penduduk Papua, hak atas pendidikan bermutu, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta hak masyarakat adat Papua dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Papua. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang kontekstual serta pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan efisien guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Papua.

Refleksi Pembangunan Pendidikan di Tanah Papua

Pendidikan telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa (Budi Suharto 2021). Terdapat beberapa permasalahan terkait regulasi pelayanan pendidikan di Provinsi Papua. Salah satu akar masalahnya adalah adanya regulasi yang kurang cocok diterapkan. Beberapa permasalahan dalam regulasi tersebut dapat disajikan sebagai berikut (B. P. Papua 2024) :

1. Belum adanya standar regulasi dan peraturan yang secara khusus mengatur sekolah berpola asrama. Sekolah berasrama saat ini umumnya dikelola oleh yayasan, namun regulasi yang mengatur hal ini perlu disesuaikan agar memastikan bahwa OAP (Orang Asli Papua) mendapatkan porsi yang dominan dalam sekolah berasrama. Selanjutnya, aturan internal sekolah yang menetapkan perbandingan jumlah siswa OAP dengan non-OAP masih perlu diperjelas dalam regulasi yang ada. Selain itu, persyaratan kualifikasi dan sertifikasi pendidik dianggap terlalu berat, terutama jika mengharuskan guru memiliki pendidikan minimal S1 dan sertifikasi, sehingga regulasi tersebut perlu disesuaikan dengan ketersediaan SDM OAP.
2. Masih terdapat ketidaksesuaian antara tingkat pelayanan pendidikan yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan

kondisi pelayanan ideal yang sesuai dengan kebutuhan Papua dan Papua Barat. Diperlukan penyelarasan dalam regulasi untuk memastikan bahwa pelayanan pendidikan sesuai dengan konteks daerah tersebut.

3. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya mutu pendidikan di Papua, terutama terkait penyelenggaraan PAUD dan Sekolah Dasar (SD)/Paket A. Kelemahan ini disebabkan oleh rendahnya jumlah dan mutu kompetensi guru PAUD dan SD, serta kurangnya sarana penunjang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan guru, termasuk melalui penyelenggaraan pendidikan keguruan di tingkat sekolah menengah, seperti Kolese Pendidikan Guru (KPG), serta penyelarasan antara berbagai peraturan terkait.

Penyediaan data OAP juga menjadi bagian penting dalam tata kelola pendidikan di Papua yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua. Ini melibatkan pembuatan regulasi yang lebih teknis untuk mengatur kriteria domisili dan prioritas peserta didik OAP. Pendidikan menjadi kewenangan khusus yang diatur dalam PP 106/2021, namun pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masih memerlukan penyelarasan agar tidak mengakibatkan keimbangan dalam pembagian tanggung jawab. Hal ini juga melibatkan pembiayaan pendidikan, di mana pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan dengan biaya semurah mungkin. Perlunya regulasi teknis yang mengatur hal ini juga menjadi penting, serta pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai bagian dari bidang pendidikan yang perlu diperjelas prosedurnya.

CONCLUSION

Pembangunan pendidikan di Tanah Papua menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Terbatasnya jumlah sekolah, kurangnya guru, dan rendahnya kualitas pendidikan merupakan masalah utama yang perlu segera diatasi. Faktor-faktor ini berpotensi mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut.

Hasil olah data menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua. Hasil ini mengindikasikan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut. Selain itu, secara simultan, ketiga variabel tersebut juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, dengan nilai R-square sebesar 99.85%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti secara bersama-sama memberikan kontribusi yang besar dalam menjelaskan variasi IPM di Provinsi Papua.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia di Provinsi Papua. Dengan pendekatan yang holistik dan sinergis, diharapkan pembangunan pendidikan di Tanah Papua dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Papua.

1. Untuk meningkatkan efektivitas pembangunan pendidikan di Tanah Papua, penting untuk secara aktif melibatkan kearifan lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat keterlibatan komunitas lokal, memahami dan menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Papua, serta mengintegrasikan aspek-aspek kearifan lokal ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan akan menjadi lebih relevan, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi masyarakat Papua.

2. Investasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Tanah Papua. Diperlukan upaya untuk memperluas jaringan sekolah, memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, perlu juga diperhatikan pemberdayaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme.

3. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting dalam mengatasi tantangan pembangunan pendidikan di Tanah Papua. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, menyediakan sumber daya yang memadai, dan mengimplementasikan program-program pendidikan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan, diharapkan pembangunan pendidikan di Tanah Papua dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Papua.

REFERENCES

Afriansyah, Anggi. 2022. "Refleksi Dua Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Di Tanah Papua (2001-2021)." *Masyarakat Indonesia* 48(1): 63–77.

Arif, Ade Alfarez Dzaki, M. Rizky Ramadhan, And Mardhotillah Bunga. 2023. "Pengaruh Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Ahh), Harapan Lama Sekolah (Hls) Dan Rata-Rata Lama Sekolah (Rls) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jambi." *Jurnal Statistika Universitas Jambi* 2(2): 116–23.

Budi Suharto, Rachmad. 2021. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Samarinda, Kalimantan Timur: Rv Pustaka Horizon.

Hidayati Et Al. 2022. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi ... Ekonomi Sumber Daya Manusia Indonesia*. Pertama. Ed. Dini Wahyu Mulyasari. Sukoharjo: Cv. Pradina Pustaka Grup. Https://ScholarArchive.Org/Work/Ngmrwnpvrvgorje5zd6urwrwhy/Access/Wayback/Http://Library Stmt-Trisakti.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Jmbtl/Article/Viewfile/65/Pdf_43.

Madris. 2021. *5 Badan Pusat Statistik Prov Papua Ekonomi Ketenagakerjaan Dan Investasi Modal Manusia*. Pertama. Tamalanrea: Pt. Nas Media Indonesia. <Https://Revistas.Ufrj.Br/Index.Php/Rce/Article/Download/1659/1508%0Ahttp://Hipatiapress.Com/Hpjournals/Index.Php/Qre/Article/View/1348%5Cnhttp://Www.Tandfonline.Com/Doi/Abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://Mckinseyonsociety.Com/Downloads/Reports/Educa>.

Manurung, Erly Nofriyanty, And Francis Hutabarat. 2021. "Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 4(2): 121–29.

Papua, Bps. 2022. *Indikator Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2022*. Ed. Papua Bps. Papua: Bps Prov Papua.

———. 2023. *1 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 2023*. Papua.

Papua, Bps Provinsi. 2024. *17 Badan Pusat Statistik Prov Papua Provinsi Papua Dalam Angka 2024*. Papua.

Strober, Myra H. 1990. "Human Capital Theory: Implications For Hr Managers." *Industrial Relations: A Journal Of Economy And Society* 29(2): 214–39.

Yahya. 2009. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan Sebuah Pendekatan Akumulatif*. Ed.Ngusman Abdul Manaf. Padang: Sukabina Offset.